

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN MAROS**

ARNIATI AS

105640216315



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN MAROS

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ARNIATI AS

Nomor Stambuk : 105640216315

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) dalam
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros.

Nama Mahasiswa : Arniati AS

Nomor Stambuk : 105640216315

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ansyari Mone, M.Pd.


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar

Fisipol Unismuh Makassar




Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.
NBM: 1031 102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 047/FSP/A.3-VIII/VII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin tanggal 26 bulan Agustus tahun 2019.



Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.

Penguji :

1. Abdul kadir adys, SH., MM.
2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si.
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si.
- 4 Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Arniati AS

Nomor Stambuk : 105640216315

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku.

Makassar, Agustus 2019

Yang menyatakan,



Arniati AS

ABSTRAK

ARNIATI AS. Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros (Dibimbing oleh bapak Ansyari Mone dan Ibu Ihyani Malik)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan UMKM dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat informan yang satu dengan yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros sudah baik namun masih ada beberapa yang perlu dibenahi. Dalam beberapa aspek dapat diketahui misalnya Standar dan Ukuran Kebijakan, Diskoperindag dengan membuat kebijakan agar masyarakat membuat perizinan dari berbagai jenis usaha, masyarakatpun mendapatkan bantuan dan timbal balik dari bantuan pemerintah tersebut membuat masyarakat rajin membayar pajak usaha. Sumber Daya manusia dari segi kuantitas belum maksimal. Karakteristik Agen Pelaksana terkait pemberdayaan UMKM terbilang berhasil. Struktur birokrasi yang bekerja sesuai dengan standar operasional pelayanan menyempurnakan proses implementasi kebijakan. Dari Sektor lingkungan sosial kegiatan usaha disuatu wilayah harus sejalan dengan adat istiadat masyarakat, sektor ekonomi lebih kepada meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan bagi daerah dan dari segi politik menekankan pada produk sebuah kebijakan harus sejalan dengan upaya pemberdayaan bagi para pelaku UMKM.

Kata kunci : Implementasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji Syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dzat pemilik alam semesta serta segala kehidupan dan kematian didalamnya. Pantaslah kita untuk senantiasa memuji dan memuji kebesaran serta keagungan-Nya. Semoga kita selaluburada dalam lindungan Illahi ditiap aktivitas keseharian kita.

Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan atas selesainya penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros” sebagai salahsatu syarat penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap skripsi ini senantiasa memenuhi hakikatnya, yaitu memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan tidak dalam waktu yang singkat. Selama penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan dan tantangan, namun hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat semangat, upaya dan usaha yang keras yang dilakukan penulis serta tentunya bantuan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan

mengarahkan penulis melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini pula, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si. dan bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.HI. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan sarandalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, dan Pelaku UMKM di Kabupaten Maros yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.
8. Teman kelas dari semester 1 sampai semester 8, IPC 015
9. Kawan-kawan Demisioner Pengurus Himjip periode 2017-2018

Ucapan terima kasih yang istimewa dan tak terhingga kepada orang tua, Ayahanda H. Ahmad Suardi dan Ibunda Nurmi. Terima kasih telah berkorban sedemikian banyak untuk penulis, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis hingga sampai seperti saat ini. Juga karena telah memberikan segala dukungan yang luar biasa kepada penulis. Baik berupa kasih sayang, dukungan moral dan materi, semangat serta doa yang tiada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki serta kebahagiaan yang tak henti kepada beliau.

Selain itu, penulis mengucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas segala khilaf yang penulis lakukan saat berucap dan bertindak. Selanjutnya, Kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, dorongan, serta dukungan, penulis mendoakan semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang setimpal Amin ya Rabbal Alamn.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 31 Agustus 2019

Penulis



ARNIATI AS

DAFTAR ISI

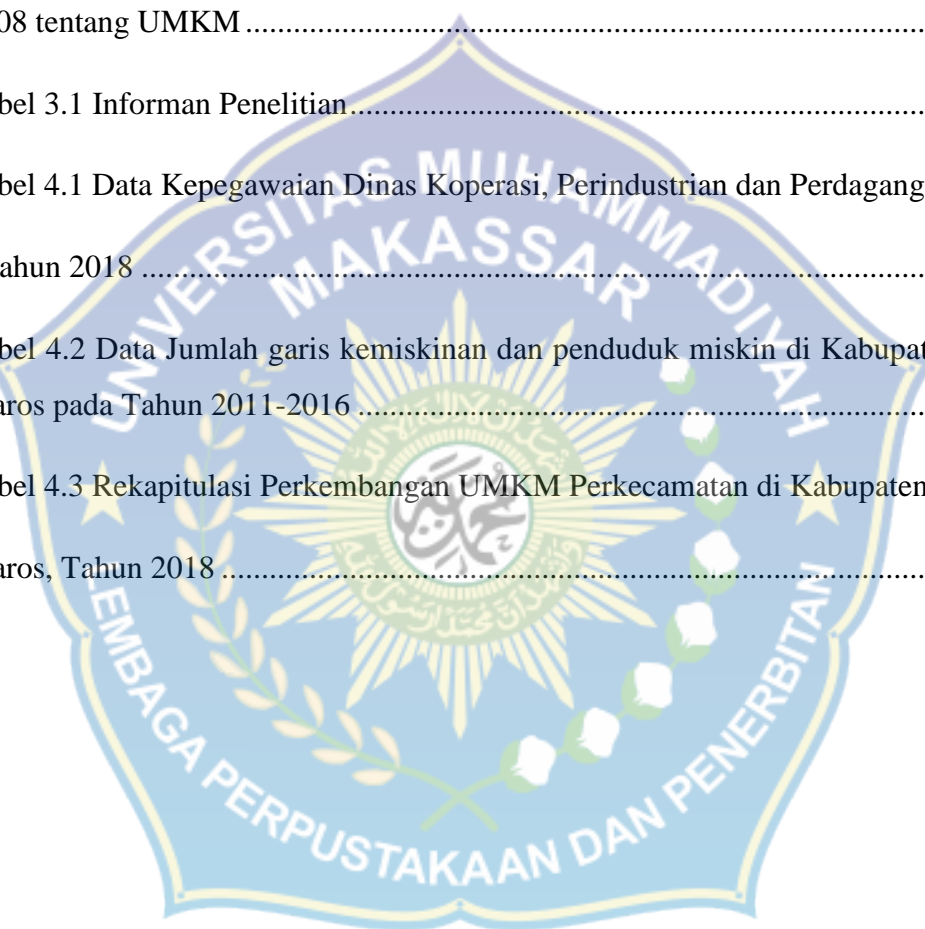
Halaman Pengajuan.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim Ujian Skripsi	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II Tinjauan Pustaka.....	9
A. Implementasi Program UMKM	9
B. Penanggulangan Kemiskinan.....	24
C. Kerangka Pikir	30
D. Fokus Penelitian.....	32
E. Deskripsi Fokus Penelitian	32
BAB III Metode Penelitian.....	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37

G. Pengabsahan Data	37
BAB IV Hasil Dan Pembahasan	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Implementasi Program UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros	49
BAB V Kesimpulan Dan Saran.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Maros tahun 2012-2015	2
Tabel 2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM	23
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan , Tahun 2018	46
Tabel 4.2 Data Jumlah garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Maros pada Tahun 2011-2016	50
Tabel 4.3 Rekapitulasi Perkembangan UMKM Perkecamatan di Kabupaten Maros, Tahun 2018	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Strategi pembangunan yang diterapkan tidak menyumbang apapun bagi kesejahteraan rakyat miskin, sebaliknya malah membuat mereka semakin sengsara. Kemiskinan menjadi masalah yang krusial di negara berkembang seperti Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke menjadikan tingkat populasi sangat tinggi sehingga menyebabkan naiknya permintaan pada kebutuhan hidup sehari-hari meliputi sandang, pangan, dan papan. Namun tidak semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh keluarga miskin. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang dan sampai saat ini belum ada bentuk penyelesaian yang tepat yang terlihat dari pemerintah. Meskipun berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan

yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan. Begitupun dengan kondisi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Maros merupakan salah satu contoh daerah yang masih mengalami permasalahan kemiskinan. Permasalahan penduduk miskin diantaranya ialah jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi, kemampuan sumber daya dan keterampilan penduduk miskin sangat terbatas, kesehatan dan gizi keluarga miskin masih rendah, kemampuan keluarga miskin menyekolahkan anak sangat terbatas, serta belum ditunjang dengan kebijakan daerah yang optimal, (Soegijoko: 2001)

Berikut jumlah dan presentase garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2010-2015

Tabel 1.1 Garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Maros, 2012-2015

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	presentase
2012	262.064	40.889	12.57
2013	278.520	43.059	12.94
2014	286.937	40.130	11.93
2015	307.717	40.08	11.85

Sumber : Badan Pusat Statistik kabupaten Maros, 2015

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah dan presentase penduduk miskin di kabupaten Maros pada tahun 2012 sebesar 40.889 ribu jiwa atau 12.57% dan naik menjadi 40.130 ribu jiwa atau 12.59% pada tahun 2013. Di tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 40.130 ribu jiwa atau 11.93%, begitupun di tahun 2015 juga mengalami penurunan, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 40.08 ribu jiwa atau 11.85%.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Peranan UMKM, terutama sejak krisis ekonomi dapat dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Walaupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain : -kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, -kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, -lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping itu terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas. Beragamnya hambatan dan kendala yang dihadapi UMKM, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi para UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi dalam pengembangan usaha.

Pemerintah perlu meningkatkan peranannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Meskipun pemerintah

telah mengeluarkan berbagai aturan untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkembang, namun produktivitasnya tetap rendah. Sulitnya UMKM meningkatkan produktivitas dan daya saingnya karena “UMKM di Indonesia menghadapi hambatan yang kompleks. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : ‘manajemen yang lemah, modal, skill, pemasaran, dan teknik produksi yang lemah’”.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka UMKM di Indonesia perlulah meningkatkan daya saingnya, dengan meningkatkan daya saing mereka diharapkan pada masa yang akan datang peran UMKM di Indonesia dalam perekonomian Indonesia akan semakin besar.

Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan UUD 1945. Selain itu konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut adalah adanya upaya pemberdayaan dan peningkatan daerah melalui perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian besar Rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Secara yuridis komitmen pemerintah ditandai dengan adanya Undang-Undang nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha kecil, yang bertujuan antara

lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan sebagai salah satu upaya penciptaan iklim usaha melalui kerjasama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Usaha Besar, serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan peraturan yakni, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, didalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Salah satu sektor penggerak perekonomian Kabupaten Maros adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disebut UMKM. Adapun jumlah UMKM yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yakni sebanyak 30.963 dari 14 kecamatan yang ada di

Kabupaten Maros. Dengan rincian sebagai berikut: Usaha Mikro sebanyak 25.372, Usaha Kecil sebanyak 5.406 dan Usaha Menengah sebanyak 186, dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM secara keseluruhan 30.963.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam permasalahan terkait UMKM di Kabupaten Maros beberapa permasalahan didapatkan setelah melakukan observasi lapangan yaitu misalnya saja sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperindag masih belum maksimal. Contohnya pada sarana promosi. Promosi merupakan salah satu cara untuk mempercepat penjualan produk, namun di Dinas Koperindag Kabupaten Maros belum memiliki event atau kegiatan pameran tersendiri, para pelaku UMKM disuruh untuk mengikutkan produknya di event yang diadakan oleh Pemkot Makassar. Dan masalah yang lainnya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Koperindag yang menangani tentang UMKM itu sendiri.

Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan salah satunya Pemberdayaan UMKM itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan penelitian mengenai “Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Serta menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaran dalam memberi informasi kepada mahasiswa.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengembangan program-program kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan hanyalah merupakan sebuah langkah awal dan belum dapat dijadikan indikator keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Proses yang jauh lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Ini karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (*forecasting*) akan masa depan yang masih bersifat semu, abstrak, dan konseptual. Namun ketika telah masuk dalam tahapan implementasi dan terjadi interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan, barulah keberhasilan maupun ketidakberhasilan kebijakan akan diketahui.

Setelah kebijakan diimplementasikan terhadap sekelompok objek kebijakan baik di masyarakat maupun unit-unit organisasi, maka akan bermunculan dampak-dampak sebagai akibat dari kebijakan yang di maksud. Udoji (dalam Wahab, 1997) dengan tegas menyatakan *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Islamy (dalam Yuyun Ningsih, 2004) bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (*intended*) maupun yang negatif (*unintended*). Untuk itu tinjauan efektifitas kebijakan, selain pencapaian tujuan harus diupayakan juga untuk meminimalisir ketidakpuasan dari seluruh stakeholder sehingga diharapkan penyimpangan kebijakan tidak akan terlalu jauh dan pada akhirnya akan mampu mencegah terjadinya konflik dimasa yang akan datang.

Dwijiwijoto (dalam Alfatih, 2010) menyatakan implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Alfatih (2010) juga menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam agustino: 2006) menyatakan “Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara sederhana Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004) menyatakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh

Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004) bahwa “Implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2002) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Menurut Agustino (2006), “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Grindle (dalam Winarno, 2002) menyatakan pendapatnya tentang implementasi bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, maka untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktivitas pelaksanaannya. Mengingat bahwa implementasi suatu program merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi-studi implemementasi.

Kebijakan Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris “*policy*”. Pendapat Anderson yang dikutip oleh Abdul Wahab,

merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Anderson dalam Abdul Wahab: 2008). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. (Wikipedia)

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan juga berorientasi pada tindakan (*action-oriented*), sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan. (Suharto, 2006)

Sementara James E. Anderson memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu

(dalam Abdul Wahab 2008). Pendapat yang lain adalah Carl Friedrich yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tuju atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Abdul Wahab 2008)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Sedangkan menurut pendapat Bardac mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan. (Marzuki. 2015)

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu, kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Disamping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan

persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicholas Hendry (1998) sebagai berikut :

- a. Pendekatan Politik, Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi.
- b. Pendekatan Struktural, Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat “*Organis*” Nampak relevan untuk implementasi kebijakan. Ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan senantiasa berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.
- c. Pendekatan Prosedural dan Managerial, Pendekatan *procedural structural* dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan public, namun tidak sepenting upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat, termasuk dalam hal ini adalah proses dan prosedur tata kelola beserta berbagai teknik dan metode yang ada.
- d. Pendekatan Perilaku, Analisis keprilakuan (*Behavioral Analisis*) pada berbagai masalah manajemen yang paling terkenal adalah apa yang sering kali disebut para penganut aliran Organisasi sebagai aliran “*Organitational develovment*” atau pengembangan organisasi.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik yakni model yang diperkenalkan Van meter dan Van Horn (subarsono : 2005) mengemukakan bahwa ada 5 (lima) variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi :

- 1) Standar dan Ukuran kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
- 4) Kecenderungan (*disposition*) pelaksana atau implementor
- 5) Karakteristik agen pelaksana

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono:2005) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 (tiga) variabel, yaitu :

1) Variabel Independen

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2) Variabel Intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga

pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan terhadap pihak luar, variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan *resourcis konstituen*, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3) Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan 5 (lima) tahapan yang terdiri dari : pertama, pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Keempat, penerimaan atas hasil nyata. Kelima, tahapan yang mengarah pada revisi pada kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model Charles Jones

Berbeda dengan model Mazmanian dan Sabatier, Charles Jones menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktifitas utama kegiatan yaitu : (1) organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode yang menunjang agar program berjalan, (2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan

(3) aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

d. Model Hogwood dan Gunn

Model ketiga adalah model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 1978 (dalam wayuddin 2012) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai.
- 4) Kebijakan yang akan di implementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai hubungannya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

e. Model Goggin

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebutnya sebagai "*communication model*" untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai generasi ketiga model implementasi kebijakan (1990). Goggin dan kawan-kawan bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedapankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel *independen, intervening, dan dependen*, meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

f. Model Merilee S. Grindle

Model *implementasi* kebijakan publik yang dikemukakan Grindle (dalam Subarsono:2005) menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain yang dipengaruhi oleh *content of policy (isi kebijakan)* dan *contex of implementation* (konteks implementasinya).

g. Model Edward III

Edward III (dalam Subarsono:2005) menegaskan bahwa masalah *utama* administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan

untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *beureucratic structures*. Edward menyebutkan terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi Implementasi kebijakan. variabel tersebut antara lain :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

h. Model Jaringan

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *comple of interaction processes* diantara sejumlah besar actor yang berada dalam suatu jaringan (*network*) actor-aktor yang independen. Interaksi diantara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting didalamnya. (Subarsono:2005)

i. Model Matland

Matland (dalam Subarsono:2005) mengembangkan sebuah model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah.

j. Model Implementasi Soren C.Winter

Winter dalam Peters and Pierre memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Winter kemudian mengemukakan 3 (tiga) Variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni :

- 1) Perilaku hubungan antar organisasi
- 2) Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah.
- 3) Perilaku kelompok Sasaran.

4. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan

Keberhasilan program dapat dikaji dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari sudut proses (*implementasi*) dan hasil (*outcomes*). Perspektif yang *pertama* menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program dan kebijakan dengan *policy guidelines*. Menurut perspektif ini, suatu program pemerintah dikatakan berhasil kalau pelaksanaan program itu sesuai dengan *policy guidelines* yang telah ditentukan. Dari tinjauan *outcomes*, suatu program dapat dinilai berhasil kalau program itu menghasilkan dampak seperti yang diinginkan.

Sabaiter dan Masmanian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan formal dari keseluruhan proses implementasi kebijakan yaitu: (wahab, 2011)

- a. Karakteristik masalah seperti ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, presentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk, ruang perilaku yang diinginkan.

- b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, seperti kejelasan dan konsistensi tujuan, teori kausal yang menandai, sumber keungan yang mencukupi, intergasi organisasi pelaksana, disreksi pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, akses formal pihak luar.
- c. Faktor-faktor yang diluar peraturan seperti kondisi sosial ekonomi, dukungan publik, sikap dan sumber daya, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Dari berbagai indikator yang termasuk dalam variabel tersebut, maka berdsarakan pertimbangan kondisi di lapangan, dirangkaikan ke dalam beberapa variabel yang dinilai paling mendekati untuk menjelaskan permasalahan proses implementasi kebijakan. Dalam konstelasi faktor yang dominan memperngaruhi proses implementasi kebijakan tersebut adalah faktor isi kebijakan dalam konteks kebijakan seperti tersedianya sumber daya, karakteristik pelaksana kebijakan, karakteristik adminitrasi dan organisasi, serta aspek waktu seperti *service delivery* dan *compliance*, disamping peristiwa atau kejadian tertentu pada saat implementasi kebijakan mempengaruhi asumsi kontiunitas, baik karakteristik kegiatan kebijakan, administrasi dan pelaksana dalam menjalankan tujuan dari kebijakan sebagai mandat yang harus dipertanggungjawabkan.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam BAB I (Ketentuan Umum) Pasal 1 dari UU tersebut. (dalam Pradytia: 2016)

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
- d. dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

6. Kriteria UMKM

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 BAB IV pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta-500 Juta	>300 juta- 2.5 Milyar
3.	Usaha Menengah	>500 juta-10 Milyar	>2.5 Milyar-50 Milyar

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Selain menggunakan nilai moneter sebagai Kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan sejumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Misalnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMI (Industri Manufaktur Industri Rumah Tangga) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; UK antara 5 hingga 9 pekerja; dan UM dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan

dengan jumlah pekerja diatas 99 orang masuk dalam kategori UB (dr. Tulus T.H. Tambunan. 2009)

B. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi daerah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggungjawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa.

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dan diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain :

1. Masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan,
2. Kebijakan yang bersifat sentralistik,
3. Lebih bersifat karikatif daripada transformatif,
4. Memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek,
5. Orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat dari pada produktivitas yang berkelanjutan, serta
6. Cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung (Bappenas. 2008).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan (Sumodiningrat. 1989) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Kebijaksanaan yang secara tidak langsung, mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin,
2. Kebijaksanaan yang secara langsung, mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan
3. Kebijaksanaan khusus, yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

a. Macam – Macam Kemiskinan

Sumodiningrat mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki beberapa macam yaitu adalah sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan Absolut, apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan Relatif, kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah disbanding pendapatan masyarakat sekitarnya.
- 3) Kemiskinan Kultural, karena mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
- 4) Kemiskinan Struktural, kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan.

(Sumodiningrat. 1989)

b. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan (Menurut Badan Pusat Statistik), faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal yaitu:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah.
- h. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah; petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar.
- n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), seperti; sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

2. Faktor eksternal yaitu keberadaan balita, anak usia sekolah, kesertaan KB, dan penerima kredit usaha (UMKM). Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga miskin. Kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang kurangnya empat penyebab (Widodo, 2006), yaitu :

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki.
- b. Rendahnya derajat kesehatan. Keadaan kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkungan kemiskinan tersebut.

- d. Kondisi terisolasi. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Kemiskinan dimasyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh diantaranya karena keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu :

- a. *Natural assets*: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- b. *Human assets*: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical assets*: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- d. *Financial assets*: berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha
- e. *Social assets*: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal inikekuatan *bargainin position* dalam pengambilan keputusan- keputusan politik.

C. Kerangka Pikir

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan peraturan yakni, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, didalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (subarsono, 2005) mengemukakan ada 5 variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi :

- a. Standar dan ukuran kebijakan
- b. Sumber daya

- c. karakteristik agen pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- e. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Untuk lebih mudah dan jelas memahami alur berpikir peneliti, maka dibawah ini peneliti menggambarkan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

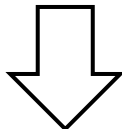
Bagan Kerangka Pikir

Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)



5 variabel yang mempengaruhi proses implementasi :

1. Standar dan ukuran kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik



Terwujudnya Visi Maros yaitu Maros lebih Sejahtera
tahun 2021

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian ini yaitu Standar dan ukuran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Menurut Van meter dan Van Horm (Subarsono, 2005) mengemukakan bahwa ada 5 (lima) variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi :

1. Standar dan Ukuran Kebijakan, dalam penelitian ini program tentang UMKM di Kabupaten Maros perlu melihat variabel sasaran dan dan tujuan kebijakan. Untuk itu peneliti perlu mengetahui sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang ada dan apakah dalam pembuatan kegiatan atau programnya sudah sesuai dengan manfaatnya apakah berjalan lurus dengan manfaat dan hasilnya. Sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana ukuran dalam pelaksanaan ini sudah berjalan.
2. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Dimana proses implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya yang tersedia. Namun peneliti disini lebih memfokuskan pada Sumber Daya

Manusia yang ada di Dinas Koperindag Kabupaten Maros apakah telah memenuhi kebutuhan UMKM tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana untuk mengetahui berapa banyak pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM tersebut lalu bagaimana karakteristik implementor dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana apakah sesuai dengan bidangnya/ apakah sesuai dengan harapan masyarakat para pelaku UMKM.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu diperlukannya koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya tingkat kesalahan yang akan terjadi semakin kecil dan begitu juga sebaliknya.

Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik, mencakup sumber daya ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, seberapa besar dan bagaimana program pemberdayaan UMKM tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang dibuat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 08 april – 06 juni 2019 atau setelah adanya perizinan penelitian yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Dan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Maros.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif adalah menganut paham *fenomonologis* dan *postpositivisme*. Sebuah aliran filsafat yang mengkaji penampakan atau fenomena yang mana antara fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu sama lain melainkan selalu berhubungan secara dialektis.

C. Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu : Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros
2. Data Sekunder adalah penelitian yang bersumber dari instansi setempat, data tersebut berupa laporan-laporan tertulis, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sampel secara sengaja dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. Nurdin SE., MM	ND	Kepala Bidang Usaha Mikro, kecil dan menengah	1 Orang
2.	Nurjannah S.Sos.	NJ	Kepala Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian	1 orang

			pada Sekretariat	
3.	Dra. Yusniati	YN	Kasi Usaha, Kemitraan, dan Pemasaran Produk UMKM pada Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah	1 orang
4.	Rini Cahyani, ST. MM	RC	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat	1 orang
5.	Endang Eriyanti S.E	HY	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro kecil dan Menengah	1 orang
6.	Fatmawati	FM	Pemilik Usaha kue kering	1 orang
7.	Sainuddin	SN	Pengrajin Kayu CV. Usaha Baru	1 orang

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

1. Wawancara (*interview*), Salah satu metode pengumpulan data, terutama digunakan dalam meneliti masalah-masalah sosial yang merupakan sebuah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka.
2. *Observasi*(pengamatan langsung) adalah pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah

yang berkaitan implementasi UMKM dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros.

3. Dokumentasi merupakan suatu informasi tertulis, visual atau fakta yang bisa dinyatakan dalam bentuk angka, grafik atau aturan perundang-undangan yang mempunyai legalitas.

F. Teknik Analisis Data

- G.** Teknik analisis penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek, dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun tidak jelas batas-batasnya. **Pengabsahan Data**

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi metode, teori, dan data yaitu :

1. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dilakukan sepanjang waktu;
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapatan dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan;

- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-*interview*. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data ketika di-*interview* dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

3. ★ Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditinjau dengan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Maros

a. Kondisi Geografi dan Batas Administrasi

Secara umum luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.619,12 km² dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14 wilayah Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan. Berdasarkan posisi dan letak geografis wilayah, Kabupaten Maros berada pada koordinat 4°45'-5°12' Lintang selatan dan 119°25'-119°58' Bujur timur. Batas Administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Gambar. 4.1 Peta Kabupaten Maros



Luas wilayah Kabupaten Maros berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan peta rupa bumi Indonesia skala 1: 50.000 edisi I tahun 1991 yang diterbitkan Bakosurtanal dan peta Administrasi BPN Maros yaitu kurang lebih 213.188,69 Ha. Sedangkan menurut BPS Kabupaten Maros 2009 luas wilayah Kabupaten Maros tercatat 1.619,12 km², Meliputi 14 kecamatan, dimana kecamatan Tompobulu dan kecamatan Mallawa merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 287,66 km² dan 235,92 km². sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan Moncongloe dan kecamatan Mandai dengan luas masing-masing adalah 46, 87 km dan 49,11 km. Dari 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Maros masih terdapat 22 Desa/Kelurahan swadaya dan 22 Desa/Kelurahan Swakarya, sedangkan sisanya sebanyak 59 Desa telah termasuk kategori Desa Swasembada.

b. Geologi

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam empat kelompok besar, yaitu :

- a) Batuan permukaan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Mallawa dengan luas keseluruhan 55.359 Ha;
- b) Batuan sedimen yang penyebarannya juga hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Bontoa dengan luas 66.195 Ha;
- c) batuan gunung api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, Camba, Mallawa dan Bantimurung dengan luas 32.008 Ha, dan

- d) batuan terobosan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Maros Baru dan Bontoa dengan luas 8.312 Ha.

c. Jumlah penduduk

Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 berjumlah 339.300 jiwa, yang tersebar di 14 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 43.778 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale (Ibukota Kabupaten). Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, hal ini tercemin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Namun di kecamatan mandai dan Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin laki-laki lebih besar dari 100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale (Ibukota Kabupaten), 1.380 jiwa/km², sedangkan yang terendah di kecamatan mallawa, 45 jiwa/km².

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Keberadaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dalam bidang Industri serta perdagangan perkembangannya dalam perekonomian nasional

terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bergerak hampir disemua sektor ekonomi dan berlokasi di perkotaan dan pedesaan. Dalam upaya menciptakan iklim usaha bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU. No. 23 Tahun 2014 kepada pemerintah.

b. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

a) Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi kantor dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan :

Gambar 4.2. Visi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

“Mewujudkan Maros Sebagai Kabupaten Koperasi, Industri dan Perdagangan Yang Terkemuka di Sulawesi Selatan”.

b) Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil

dengan baik. Adapun misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros yang ditetapkan adalah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM, kelompok–kelompok usaha tradisional dalam bidang usaha, sehingga mampu mengelolah usahanya dengan baik.
2. Pengembangan koperasi yang tangguh sebagai sukoguru perekonomian daerah yang melibatkan Industri, perdagangan dan UKM.
3. Menggerakkan Pengusaha Kecil membentuk kelompok usaha berdasarkan Komoditi unggulan daerah melalui subsidi kebutuhan dasar. Bantuan kredit dan bantuan modal kerja
4. Meningkatkan aktivitas dan kuantitas industri dan perdagangan untuk pengembangan kemitraan usaha.
5. Memberikan kemudahan-kemudahan di sektor perizinan dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan yang ada di daerah.
6. Meningkatkan kemampuan keterampilan daya saing para industri rumah tangga.
7. Peningkatan/pengembangan usaha agar dapat tercipta satu produk unggulan di setiap kecamatan yang di kelola oleh koperasi.
8. Mewujudkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Koperasi.

c. Struktur Organisasi Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pedoman susunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - a) Kasubag Program
 - b) Kasubag Kepegawaian dan umum
 - c) Kasubag Keuangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Kepala Bidang Koperasi
 - a) Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi
 - b) Kepala Seksi Simpan Pinjam Koperasi
 - c) Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi
- 5) Kepala Bidang UMKM
 - a) Kepala Seksi Peng.SDM Usaha Kecil Menengah
 - b) Kepala Seksi Bina Usaha Mikro/PKL
 - c) Kepala Seksi Bina Usaha UKM
- 6) Kepala Bidang Perdagangan

- a) Kepala Seksi Penyaluran Promosi dan Ekspor Daerah
- b) Kepala Seksi Sarana Peng. Sarana Perdagangan Pndf. Perusahaan
- c) Kepala Seksi Metrologi dan Perlin. Konsumen
- 7) Kepala Bidang Perindustrian
 - a) Kepala Seksi Sarana Usaha Industri
 - b) Kepala Seksi Bimbingan Produksi
 - c) Kepala Seksi Pengawasan Industri
- 8) UPT. Pasar
KTU.UPT Pasar
- 9) UPT. Industri
KTU.UPT Industri
- d. Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**

Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun jumlah pegawai yang menjadi sumber daya dalam Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menurut golongan dan jenis kelamin tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1 Data Kepegawaian Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan, Tahun 2018**

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	I/a	1	-	1
2	I/b	1	-	1
3	I/c	3	1	4
4	I/d	-	-	0
5	II/a	1	5	6
6	II/b	1	-	1
7	II/c	5	1	6
8	II/d	1	1	2
9	III/a	4	-	4
10	III/b	7	6	13
11	III/c	5	7	12
12	III/d	5	3	8
13	IV/a	2	-	2
14	IV/b	1	-	1
15	IV/c	1	-	1
16	IV/d	-	-	0
JUMLAH		38	24	62

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Maros, 2018

e. Sasaran dan Tujuan

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros telah menetapkan tujuan strategi berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Tujuan sebagai acuan Perencanaan Program Operasional anggaran dan pedoman penyusunan APBD, juga sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD dan menjadi pedoman untuk penyusunan Renstra dalam tahun yang akan datang.
- II. Sasaran untuk mencapai sasaran tersebut disusun prioritas dan arah kebijakan pembangunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros Tahun 2010- 2015 di capai secara bertahap melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang di implementasikan dalam program kerja tahunan yang di tetapkan berdasar skala prioritas.

f. Cara Pencapaian Tujuan

a) Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan strategis.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah

maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian, kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan dijelaskan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

b) Kebijakan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan, yang cocok. Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- I. Memanfaatkan segenap sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan fungsi yang ada dalam rangka pengembangan peran serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan .
- II. Menciptakan terselenggaranya koordinasi dan konsultasi yang konstruktif dan berkelanjutan dengan seluruh Instansi/Lembaga atau badan yang terkait dengan pembangunan perekonomian d tingkat pusat dan tingkat daerah.

- III. Mengembangkan kerjasama dalam rangka mempercepat perkembangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan baik dalam lingkup Domestik maupun Internasional.
- IV. Meningkatkan peran dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka merapatkan hubungan dengan Pemerintah daerah (Provinsi dan Pusat) serta dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah.

B. Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan peraturan yakni Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan

Peraturan Bupati (Perbup) No. 28 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Didalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Dimana program-program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sampai saat ini oleh pemerintah Kabupaten Maros yang bertujuan salah satunya untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada, dan melalui program-program tersebut angka kemiskinan di Kabupaten Maros telah mengalami penurunan walaupun tidak secara optimal.

Tabel 4.2. Data Jumlah garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Maros pada Tahun 2011-2016

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Presentasi
2011	145.473	42.440	13.17
2012	262.064	40.889	12.57
2013	278.520	43.059	12.94
2014	286.937	40.130	11.93
2015	307.717	40.08	11.85

2016	336.579	39.02	11.41
------	---------	-------	-------

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Dari tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dengan rincian, pada tahun 2011 penduduk miskin sebanyak 42.440 ribu jiwa dan turun menjadi 40.889 ribu jiwa di tahun 2012. Memasuki tahun 2013 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 43.059 ribu jiwa dan di tahun 2014 mengalami penurunan sehingga jumlah penduduk miskin sebanyak 40.130 ribu jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi 40.08 ribu jiwa dan ditahun 2016 pun juga mengalami penurunan sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros sebanyak 39.02 ribu jiwa.

Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang berada di kabupaten Maros. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Sub bagian umum, asset dan kepegawaian pada sekretariat bahwasanya

jumlah keseluruhan pegawai berdasarkan DUK PNS pada Dinas Koperindag adalah 62 orang terdiri dari gol IVc sebanyak 1 orang, gol IV b sebanyak 1 orang, gol IVa sebanyak 2 orang, gol III d sebanyak 8 orang, gol IIIc sebanyak 12 orang, gol IIIb sebanyak 13 orang, gol IIIa sebanyak 4 orang, gol II d sebanyak 2 orang, golongan IIc sebanyak 6 orang, gol IIb sebanyak 1 orang, gol IIa sebanyak 6 orang, gol Ic sebanyak 4 orang, gol Ib sebanyak 1 orang, dan gol Ia sebanyak 1 orang bila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Maros yaitu :

Tabel 4.3. Rekapitulasi Perkembangan UMKM Perkecamatan di Kabupaten Maros, Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JENIS USAHA			JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
1	TURIKALE	1,471	3,691	58	5,220
2	MAROS BARU	230	1,331	9	1,570
3	LAU	324	2,037	7	2,368
4	BONTOA	449	1,705	6	2,160
5	MANDAI	515	2,395	19	2,929
6	MARUSU	623	2,009	12	2,644
7	TANRALILI	293	2,185	7	2,485
8	TOMPOBULU	192	1,449	6	1,647
9	MONCONGLOE	151	1,082	19	1,252
10	BANTIMURUNG	302	2,593	11	2,906

11	SIMBANG	241	1,313	7	1,561
12	CAMBA	246	1,478	9	1,733
13	CENDRANA	187	1,274	8	1,469
14	MALLAWA	182	830	7	1,019
JUMLAH :		5,406	25,372	185	30,963

Sumber : Diskoperindag Kab. Maros Tahun 2018

Pada tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa perbandingan jumlah pegawai Dinas Koperindag sangat besar antar 62 berbanding 30.963 sehingga pihak dinas berupaya melakukan kinerja semaksimal mungkin agar bisa, mengkoordinir secara keseluruhan untuk memberikan pemberdayaan kepada para UMKM.

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros sudah terlaksana dengan cukup baik. Menarik kemudian dalam penelitian kali ini melihat bentuk implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Maros dengan melihat aspek sebagai berikut:

a. Standar Dan Ukuran Kebijakan

Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh peran pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketepatan standar dan sasaran tersebut. Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi

kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh peran pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros yaitu adalah Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Dalam peraturan tersebut diatur tentang hak dan kewajiban camat untuk melayani masyarakat salah satunya perlindungan pelaku usaha.

“Berbicara tentang standar dan ukuran kebijakan yang pihak kami lakukan adalah dengan memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha, termasuk pada tingkat pemberian izin kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan memberikan rekomendasi untuk mengurus perizinan sehingga dipermudah hingga selesai pengurusan dengan demikian masyarakat akan lebih mudah dalam mengembangkan usaha.” (Wawancara dengan ND 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan ND pemerintah menjamin penuh kegiatan para pelaku usaha baik dari segi urusan perizinan. Dengan demikian masyarakat dapat dipastikan mendapat pelayanan yang terbaik guna meningkatkan kegiatan usaha.

Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkait para pelaku usaha di Kabupaten Maros mengarah kepada terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan izin usaha agar mampu mengembangkan ekonomi dari masyarakat di kabupaten Maros.

“Berbicara terkait ukuran dan standar sebuah kebijakan ini lebih kepada mengarahkan sebuah program kepada para pelaku UMKM agar kegiatan usaha mereka dapat terkoordinir dengan baik. Kordinasi antara pemerintah dan para pelaku UMKM tentu sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha dari masyarakat” (Wawancara dengan NJ 24/06/2019)

Hasil Wawancara dengan informan NJ dapat dilihat bahwa sebuah ukuran kebijakan mengarah kepada agar kegiatan para pelaku usaha dapat di koordinir dengan baik oleh pemerintah dengan demikian keberlangsungan usaha dapat berjalan.

Keberhasilan sebuah kebijakan tergantung dari standar dan ukuran sebuah kebijakan. Para pemangku kepentingan atau dalam hal ini pemerintah daerah sudah tentu membuat sebuah kebijakan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Maros merupakan fokus pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya menyiapkan standarnisasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dimana para pelaku UMKM diharapkan dapat mematuhi semua kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

“Pemberdayaan UMKM memang menjadi fokus pemerintah daerah Kabupaten Maros. Namun semua dapat terlaksana dengan baik jika para pelaku UMKM mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan. Sehingga fokus kami adalah melakukan pembinaan kepada semua

pelaku UMKM. Misalnya semua masyarakat yang mempunyai usaha harus mengantongi izin berusaha.” (Wawancara YN 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan YN dapat disimpulkan bahwa ukuran dan standar dari sebuah kebijakan adalah ketika masyarakat atau dalam hal ini para pelaku UMKM mampu mematuhi program yang ada, terlebih setiap para pelaku usaha harus mengurus izin usaha.

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap implementasi kebijakan dikatakan berhasil ketika tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Maros untuk mendorong usaha perekonomian masyarakat melalui bantuan modal baik bentuk peralatan ataupun pelatihan sehingga masyarakat para pelaku UMKM mampu untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.

“Pemerintah Maros memang mewajibkan para pelaku usaha untuk mengantongi izin, namun bagi saya pribadi itu sangat membantu terlebih kami mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha yang kami miliki. Seperti peralatan yang kami miliki itu merupakan bantuan dari pemerintah.” (Wawancara FM 27/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan FM salah satu fokus pemerintah dalam memberdayakan para pelaku UMKM melalui bantuan dari pemerintah. Dengan bantuan tersebut masyarakat lebih mudah mengembangkan kegiatan usahanya.

Keberhasilan dari proses implementasi kebijakan ketika baik pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dapat menerima manfaat. Sinergitas yang terbentuk akan lebih memudahkan sebuah kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

Pelaku UMKM Kabupaten Maros merasa terbantu dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat dengan nyaman menjalankan kegiatan usaha dan membuat masyarakat rajin membayar pajak guna menambah pendapatan daerah.

“Bantuan dari Dinas Koperindag sangat membantu usaha kami, bagi kami para pedagang kecil tentu merasa sangat diperhatikan, sebagai bentuk terimakasih kami kepada pemerintah adalah kami giat membayar pajak usaha, yang nantinya itu juga akan kembali kepada kami dalam bentuk modal.” (Wawancara dengan SN 27/06/2019)

Sinergitas antara pemerintah Kabupaten Maros dengan para pelaku UMKM membuat pelaku usaha intens melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah, dengan demikian standar dan ukuran kebijakan yang dibuat dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi penulis terkait standardan ukuran kebijakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM adalah dengan membuat kebijakan agar masyarakat membuat perizinan dari berbagai jenis usaha, masyarakatpun mendapatkan bantuan modal dan timbal balik dari bantuan pemerintah tersebut membuat masyarakat rajin membayar pajak usaha. Dan Hasil dari wawancara dari berbagai pihak yakni membuktikan bahwa dari aspek Standar dan ukuran kebijakan dapat

dikatakan berhasil karena pelaku UMKM merasa terbantu dalam mengurus perizinan untuk usaha mereka.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan alat yang digunakan dalam menentukan keberhasilan kebijakan dalam pemberdayaan. Sumber daya baik dari sumber daya manusia sumber daya finansial ataupun sumber daya waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn, 1974) bahwa : “sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan”. Namun dalam proses implementasi kebijakan fokus kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Dinas Koperindag Kabupaten Maros melakukan berbagai upaya yang dilakukan guna dapat mengimplementasikan program pemberdayaan UMKM. Salah satunya melalui pelatihan ataupun sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkuat pemahaman dalam membangun usaha yang lebih baik.

“Sumber daya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pemberdayaan, sehingga para aparatur pelaksana berfokus melakukan pelatihan, diklat ataupun sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana melakukan kegiatan usaha yang baik sehingga mendapatkan keuntungan besar. Fokus kami memang bukan kepada usahanya tapi lebih kepada memberikan pemahaman kepada

para pelaku usaha terkait kegiatan usaha.” (Wawancara dengan ND 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan ND dapat disimpulkan salah satu hal yang dilakukan pemerintah kabupaten Maros demi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses mengembangkan usaha melalui berbagai kegiatan. Fokus pemerintah memang membangun sumber daya terlebih dahulu agar lebih mudah mencapai tujuan dari program yang dicanangkan.

Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur unsur manusia (cipta, rasa, dan karsa) sebagai aset suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi dengan cara memperoleh, mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja secara efektif dan efisien.

Aparatur pemerintah kabupaten Maros melalui Dinas Koperindag melihat bahwa keberhasilan sebuah program tergantung dari para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini erat keterkaitannya dengan para pegawai dalam ruang lingkup dinas koperindag kabupaten Maros.

“Saya lebih melihat keberhasilan pemberdayaan itu tergantung dari sumber daya manusia dari para agen pelaksana. Pemerintah harus menyediakan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten dan memahami proses dari pemberdayaan. Karena bagaimanapun suatu program dibuat jika tidak didukung dari keberdaan sumber daya maka itu akan terasa percuma. Namun kami dari Dinas Koperindag masih kewalahan karena jumlah SDM di Dinas sangat sedikit dibandingkan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Maros” (Wawancara dengan NJ 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan NJ dapat dilihat bahwa fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Terutama Sumber Daya Manusia yang dari segi

kuantitas belum mencukupi. Kebijakan tidak hanya sekedar dibuat tapi kebijakan lebih kepada bagaimana dapat sesuai dengan tujuan.

Hadirnya pemerintah tidak hanya sekedar membuat sebuah kebijakan tapi kehadiran pemerintah harus menjembatani masyarakat dalam proses pemberdayaan.

Pemberdayaan para pelaku usaha di kabupaten Maros salah satu upaya yang dilakuakn adalah menjembatani para pelaku usaha untuk membangun kemitraan dengan para pelaku usaha yang lebih besar, melalui kemitraan tersebut para pelaku usaha akan saling bekerjasama baik dari segi pemasaran atau bantuan modal.

“Pihak kami sangat memperhatikan seluruh sumber daya yang dimiliki, guna memaksimalkan pemberdayaan para pelaku UMKM, salah satu contohnya adalah menjembatani para pelaku usaha kecil untuk bekerja sama dengan pemilik usaha menengah, kerjasama yang dilakukan sangat beragam baik dalam hal pemasaran ataupun kerjasama dalam peradaan peralatan. Dengan demikian tujuan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.” (Wawancara dengan YN 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan YN dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah hadir dengan melihat keseluruhan potensi sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM. Dengan demikian proses pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber daya modal tidak terbatas berupa uang, tetapi dapat pula berupa barang modal, seperti peralatan, mesin-mesin, dan bangunan. Modal dalam definisinya yang paling luas adalah segala sesuatu yang sudah diproduksi yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa

lainnya. Sumber daya modal adalah (sarana) yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain, misalnya: uang, bahan mentah, mesin, perkakas, dan sebagainya.

Modal merupakan permasalahan yang paling mendasar dari kegiatan usaha masyarakat, permasalahan tersebut juga menjadi kendala dari kegiatan usaha masyarakat di kabupaten Maros. Sehingga hal tersebut menjadi fokus dari dinas koperindag kabupaten Maros agar dapat memaksimalkan kegiatan usaha masyarakat.

“Kalau saya melihat keberhasilan program pemberdayaan para pelaku UMKM di kabupaten Maros itu tergantung sumber daya modal yang dimiliki. Sehingga keberadaan modal menjadi salah satu fokus yang harus kami perhatikan. Sejauh ini bantuan yang kami berikan kepada masyarakat dengan cara memberikan rekomendasi dari Dinas Koperindag untuk peminjaman modal di Bank karena tidak ada dana khusus yang pemerintah sediakan untuk UMKM tersebut. Kami selalu memberikan jalan kepada para pelaku usaha guna mendapatkan modal, terlebih kegiatan usaha yang pertama harus diperhatikan adalah ketersediaan modal.” (Wawancara dengan RC 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan RC dapat disimpulkan kehadiran pemerintah dalam rangka pemberdayaan para pelaku UMKM di kabupaten Maros hal yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah ketersediaan modal. Dinas Koperindag Kabupaten Maros selalu memaksimalkan seluruh potensi yang ada agar pelaku usaha dapat memperoleh modal dalam membangun usaha yang dibangun masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat UMKM merupakan salah satu sektor riil yang mampu bertahan di tengah perkembangan makro ekonomi yang mengarah *disruption technology*. UMKM kini menjadi salah satu fundamental penting bagi perekonomian di Indonesia. Jumlah

karyawan suatu UMKM lebih sedikit bila dibandingkan dengan perusahaan skala besar, bukan berarti UMKM tidak butuh SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas menghadapi persaingan bisnis saat ini. Karena SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing global menjadi hal penentu kesuksesan UMKM. Untuk itu dibutuhkan Manajemen SDM sehingga masing-masing individu yang bekerja dapat berkontribusi secara maksimal bagi UMKM.

Pelaku UMKM di Kabupaten Maros mendapatkan pelatihan dari pemerintah terkait bagaimana membuat produk yang dapat dilirik masyarakat. seperti halnya bagi pembuat kue kering, pelatihan tidak hanya bagaimana cara memasarkan tapi juga bagaimana membuat kemasan kue agar menarik untuk dibeli.

“Kami mendapat pelatihan dari pemerintah tentang bagaimana membuat label atau kemasan bagi dagangan seperti dagangan saya yaitu Kue kering. Pelatihan tersebut mulai dari pelabelan, merek sampai kekemasan. Dengan pengetahuan tersebut saya jadi lebih mudah mengembangkan usaha saya dan bagaimana menjadikan usaha saya dapat diketahui oleh para pembeli.” (Wawancara dengan FM 27/06/2019)

Hasil wawancara dengan FM dapat disimpulkan kehadiran pemerintah Kabupaten Maros dalam memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha membuat masyarakat lebih mudah mengembangkan usaha yang dimiliki. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan observasi penulis terkait sumber daya terkait dengan pemberdayaan UMKM bagi masyarakat di Kabupaten Maros mengacu

kepada ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan modal. Misalnya saja dalam sumber daya manusia program pemberdayaan UMKM, dari segi kualitas pegawai dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Maros memiliki kualitas yang baik namun dari segi kuantitas masih kurang dan tetap harus belajar dan berlatih agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini sedang menghadapi persaingan global. Karena bila melihat jumlah luas wilayah Kabupaten Maros, jumlah UMKM yang begitu banyak sekitar ribuan masih belum mencukupi jumlah pegawai dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten maros untuk membina ke lapangan secara menyeluruh. Sehingga harus ada penambahan atau kerjasama dengan pihak Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam segala hal pemberdayaan UMKM.

Menanamkan pengetahuan kepada para pelaku usaha tentang bagaimana menjalankan usaha dengan baik membuat masyarakat lebih mudah mengembangkan usaha yang dimiliki. Selanjutnya ketersediaan modal merupakan penopang sehingga pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Menurut pendapat Van Meter dan Van

Horn dalam Agustinus (2006): “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengel betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.”

Pemerintah Kabupaten Maros sangat serius dalam memberdayakan masyarakat melalui kegiatan UMKM. Karena selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaksanaan UMKM juga membuat masyarakat lebih mandiri dan tidak terus bergantung kepada bantuan dari pemerintah.

“Keberhasilan menjalankan program memang harus didukung dengan keberadaan aparatur yang saling bekerjasama guna menyukseskan sebuah program. Semua bidang yang ada dalam struktur kerja saling bekerjasama guna merealisasikan program pemberdayaan masyarakat pada sektor UMKM, dengan demikian pemberdayaan pada sektor UMKM dapat berjalan dengan baik.” (Wawancara dengan ND 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan ND dapat disimpulkan kerjasama antara aparatur birokrasi dalam ruang lingkup Dinas Koperindag Kabupaten Maros menjadi alasan kuat dalam terealisasinya proses implementasi bagi para pelaku usaha dalam ruang lingkup Kabupaten Maros.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan

sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Aparatur dalam ruang lingkup Dinas Koperindag Kabupaten Maros dituntut disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat. Hal ini kemudian menjadi acuan semangat kerja bagi para aparatur birokrasi dalam pengimplementasian suatu kebijakan.

“Para aparatur benar-benar diarahkan kepada bagaimana dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha perlu sebuah acuan yang tepat. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dalam setiap program. Aparatur harus cerdas dalam melihat peluang yang bisa dimanfaatkan guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM.” (Wawancara dengan NJ 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan NJ dapat disimpulkan bahwa aparatur pelaksana daerah benar-benar diarahkan kepada tanggung jawab yang besar guna meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan UMKM. Sehingga pola pemberdayaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Aparatur birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengikuti standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan. Sebagai agen pelaksana para aparatur pemerintahan tentu harus mempunyai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dinas koperindag Kabupaten Maros menekankan kepada seluruh aparat birokrasi untuk senantiasa memperhatikan standar pelayanan guna keberhasilan sebuah program yang dijalankan. Dengan demikian setiap program yang berjalan mampu terealisasi dengan baik.

“Para pelaksana kebijakan harus bekerja secara professional sesuai dengan standar operasional pelayanan yang telah dibuat, setiap bidang kerja sudah mempunyai tugasnya masing-masing tinggal bagaimana kemudian setiap bidang yang ada itu saling bekerjasama dengan baik sehingga pelaksanaan pemberdayaan para pelaku UMKM juga dapat berjalan dengan maksimal.” (Wawancara dengan RC 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan RC pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM tergantung kepada profesionalitas kerja dari para aparat birokrasi yang ada sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM dalam hal ini Dinas Koperindag Kabupaten Maros mendapat apresiasi dari para pelaku UMKM atas usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penilaian masyarakat terutama pada pemahaman pemerintah terkait apa yang harus dilakukan.

“Saya lebih melihat kepada proses pelaksanaan program, pemerintah sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan kami para pelaku usaha. Sehingga dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan

baik. Seperti sebelumnya saya bilang mulai dari persiapan, kebutuhan dan pelaksanaan usaha kami itu mendapat bimbingan dari instansi terkait. Tentu itu sangat membantu kami para pelaku usaha dalam rangka mengembangkan usaha yang dimiliki.” (Wawancara dengan SN 27/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan SN dapat dilihat kepuasan dari para pelaku UMKM dalam merealisasikan program yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberdayakan pelaku usaha mendapat dukungan positif dari para pelaku usaha.

Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (*action*) diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemberdayaan UMKM dalam ruang lingkup Kabupaten Maros melalui strategi yang tepat. Para agen pelaksana benar-benar mempelajari keseluruhan proses yang harus dilakukan dalam meningkatkan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

“Strategi pelaksanaan sangat baik menurut saya, jadi pemerintah tidak hanya sekedar memberikan modal kepada kami tapi lebih kepada strategi dalam meningkatkan usaha kami. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya memenuhi kebutuhan para pelaku usaha dalam waktu dekat tetapi juga dalam waktu yang sangat panjang.” (Wawancara dengan FM 27/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan FM dapat dilihat bahwa para pelaksana kebijakan terbilang sukses dalam melaksanakan implementasi suatu program, hal ini merupakan acuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kegiatan UMKM.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait karakteristik agen pelaksana dalam rangka pemberdayaan pelaku UMKM di kabupaten Maros dapat dilihat dari proses kerjasama, disiplin dan tanggung jawab para agen pelaksana sehingga proses implementasi kebijakan terkait pemberdayaan UMKM terbilang berhasil. Struktur birokrasi yang bekerja sesuai dengan standar operasional pelayanan menyempurnakan proses implementasi kebijakan.

d. ★ Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hirarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses penciptaan dan saling menemukan pesan dalam satu hubungan jaringan tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Dengan demikian, prospek kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Horn dan Van Meter dalam Widodo, 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme

yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Berkembangnya pelaku UMKM di Kabupaten Maros tidak terlepas dari peran pemerintah dalam membangun komunikasi pada sektor unit-unit tertentu dalam rangka pengembangan UMKM.

“Komunikasi adalah hal penting yang harus dibangun guna meningkatkan UMKM di kabupaten Maros. Komunikasi yang dimaksud adalah misalnya dalam pemberian izin mendirikan bangunan, disana kita biasa terjun untuk membantu para pelaku usaha, terlebih bagi usaha mikro, ini penting guna menjaga keberlangsungan usaha.”
(Wawancara dengan NJ 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan NJ dapat dilihat bentuk komunikasi yang dilakukan antar sektor instansi pemerintahan lebih kepada izin dalam mendirikan usaha agar para pelaku usaha tidak terkendala dalam urusan perizinan.

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting bagi pencapaian tujuan keberhasilan bisnis. Komunikasi bisnis melibatkan pertukaran informasi yang terus menerus. Semakin luasnya bisnis maka semakin besar pula tekanannya pada bisnis tersebut untuk menemukan cara komunikasi yang lebih efektif bersama para pekerja. Sejalan dengan pesatnya perubahan ekonomi dan kegiatan bisnis yang berjalan, pengusaha membutuhkan strategi komunikasi yang tepat dalam perubahan dan pertumbuhan bisnisnya agar bisnis yang ditekuninya bisa berkembang dan diterima oleh masyarakat.

Perkembangan dunia usaha yang meningkat mengharuskan para pelaku usaha di kabupaten Maros lebih giat dalam membangun komunikasi antar sesama pengusaha. Dalam hal ini pemerintah memiliki fungsi untuk menjembatani para pelaku usaha agar saling bertukar pikiran.

“Pihak kami selalu membuka ruang kepada pengusaha untuk saling berinteraksi demi kemajuan usaha dari para pelaku usaha. Disini fungsi kami dalam persoalan komunikasi adalah menjembatani para pengusaha agar dapat membangun jaringan yang luas. Seperti pada pemasaran, pemerintah memasarkan produk dari para pelaku UMKM kedaerah lain atau bahkan kemancanegara, kami juga selalu mengkoneksikan antara pengusaha satu dan yang lainnya agar mereka dapat saling bekerjasama dalam mengembangkan usaha.” (Wawancara dengan RC 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan RC dapat disimpulkan kehadiran pemerintah dalam membangun koneksi antar para pelaku UMKM demi berkembangnya usaha para pelaku UMKM. Pemerintah juga membangun komunikasi dalam dunia pemasaran untuk memasarkan produk dari para pelaku usaha.

Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*procces oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik.

Aktivitas organisasi pada dinas koperindag kabupaten Maros lebih kepada memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM termasuk dalam

pengembangan usaha dan perluasan pemasaran produk. Selain itu aktivitas lain yang dilakukan adalah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM agar dimudahkan dalam mengurus izin usaha.

“Demi terwujudnya pengembangan UMKM di kabupaten Maros tentu kita harus giat dalam memberikan pelatihan juga penguatan SDM. Memudahkan pengurusan izin usaha bagi para pelaku UMKM adalah aktivitas nyata yang kami lakukan agar para pelaku usaha dapat mendirikan usaha tanpa hambatan sedikitpun.” (Wawancara YN 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan YN adalah aktivitas dinas koperindag kabupaten Maros dalam memberdayakan para pelaku UMKM adalah dengan memberikan pelatihan bagi para pelaku usaha juga dengan memudahkan izin dalam membangun usaha.

Pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pelaku UMKM kabupaten Maros menganggap bahwa dinas koperindag dalam menjalankan programnya telah memiliki SDM disetiap lini yang ada dalam struktur organisasi, sehingga pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha dapat berjalan dengan baik.

“Kalau saya berpendapat pemerintah berhasil melakukan tugasnya dalam memberdayakan para pelaku UMKM, hal tersebut dapat terwujud dikarenakan pemerintah telah memaksimalkan para aparaturnya disetiap lini yang ada, ada yang mengurus izin usaha, ada yang melakukan pendataan juga ada yang bertugas dalam memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM.” (Wawancara dengan SN 27/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan SN dapat dilihat bahwa keseriusan pemerintah dalam memberdayakan para pelaku UMKM dengan terstrukturnya kinerja aparatur sehingga dalam memberdayakan para pelaku UMKM juga dapat berjalan maksimal.

Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah. Komunikasi organisasi mempunyai peranan penting dalam memadukan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi.

Kemajuan teknologi dan informasi juga mempengaruhi perkembangan para pelaku usaha di kabupaten Maros, sehingga aktivitas pemerintah dalam memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha terkait pada dunia teknologi sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya sebuah usaha.

“Permasalahan para pelaku usaha sebenarnya pada strategi pemasaran produk, sehingga memang dibutuhkan komunikasi antar pelaku usaha dan konsumen dengan memanfaatkan teknologi. Pada kisaran tahun 2018 pemerintah memberikan pelatihan kepada kami tentang cara mengembangkan usaha dengan memanfaatkan teknologi, saya fikir upaya tersebut sangat membantu perkembangan usaha kami.” (Wawancara dengan FM 27/06/2019)

Hasil wawancara dengan FM pelatihan dalam memasarkan produk usaha dengan memanfaatkan teknologi merupakan upaya yang dilakukan

pemerintah dalam rangka aktivitas organisasi guna mengembangkan usaha para pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam memberdayakan para pelaku UMKM di kabupaten Maros Dinas Koperindag Kabupaten Maros menjalankan beberapa strategi beberapa diantaranya dengan menyiapkan aparatur yang bertanggung jawab disetiap bidang yang ada serta dengan memberikan beberapa pelatihan kepada para pelaku UMKM. Selanjutnya pemerintah juga menjadi jembatan bagi para pelaku usaha dalam membangun komunikasi pada kegiatan usaha para pelaku UMKM.

e. ★ Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Kebijakan pemberdayaan pelaku UMKM dikabupaten Maros secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor usaha para pelaku UMKM, dengan demikian pemerintah terus memacu tumbuh kembangnya kegiatan UMKM dikabupaten Maros.

“Berbicara keterkaitannya dengan perekonomian saya fokus berbicara ekonomi karena kegiatan UMKM memang pada dasarnya selain

meningkatkan perekonomian masyarakat secara tidak langsung juga meningkatkan pendapatan daerah. Dengan banyaknya masyarakat yang bisa diberdayakan melalui dunia usaha tentu akan mempengaruhi pendapatan daerah. Sehingga fokus kami memang dalam pertumbuhan ekonomi.” (Wawancara dengan ND 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan ND dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM memang menjadi fokus pemerintah kabupaten Maros demi meningkatkan perekonomian Kabupaten Maros.

Hubungan sosial seringkali diwarnai oleh kepentingan serta kepentingan lainnya. Hubungan sesama bisa erat ataupun renggang sesuai dengan kepentingan yang terus berkembang. Dalam implementasi sebuah kebijakan penting untuk mengetahui semua preferensi nilai-nilai dalam masyarakat dan tekanan kecenderungannya.

Pengaruh lingkungan sosial dalam rangka pemberdayaan para pelaku UMKM di Kabupaten Maros adalah lebih kepada kegiatan usaha yang seringkali bertentangan dengan norma dari masyarakat terlebih kepada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang sangat memegang teguh adat istiadat.

“Tentu lingkungan sosial sangat memberikan pengaruh terhadap berkembang atau tidaknya sebuah usaha, bahkan kondisi lingkungan sosial yang selalu menjadi perbincangan setiap pembangunan unit usaha, katakanlah seperti tempat hiburan karaoke, usaha seperti ini kerap mendapat penolakan dari masyarakat di daerah pedesaan karena dianggap tidak memiliki manfaat dan bisa merusak moral masyarakat. Sehingga kami dan pelaku usaha harus melakukan tindakan persuasive terhadap masyarakat dan tentu melihat plus minus ketika akan membangun sebuah usaha.” (Wawancara dengan RC 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan RC permasalahan yang kerap kali ditemukan adalah kegiatan usaha yang bertentangan dengan adat istiadat dari masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengkajian mendalam sebelum membangun unit usaha.

Politik adalah kegiatan dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasaan atau pendapatan untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau daerah. Dalam pengembangan ekonomi, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi.

Kegiatan pemberdayaan pelaku UMKM dikabupaten Maros juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang ada, terlebih kepada perubahan regulasi sehingga pemberdayaan pelaku usaha menuntut kerjasama dengan kecamatan agar mampu membangun usaha sesuai dengan potensi yang ada dalam kecamatan.

“Kebijakan politik sangat mempengaruhi kegiatan usaha yang ada dikabupaten Maros, terlebih tendensi politik dalam dunia usaha berkaitan erat dengan kebijakan yang kadang bertentangan dengan kemampuan para pelaku UMKM. Untuk meminimalisir pengaruh politik dinas Koperindag bekerjasama dengan pihak kecamatan agar melihat potensi yang ada diwilayahnya masing-masing kemudian mendampingi para pelaku usaha dalam meningkatkan usaha masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing.” (Wawancara dengan YN 24/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan YN untuk menanggulangi kebijakan politik yang bisa saja bertentangan dengan kondisi para pelaku usaha yang ada disetiap wilayah di kabupaten Maros, dinas koperindag

melibatkan camat untuk senantiasa melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM.

Pemerintah dalam upaya untuk mengurangi pengangguran berharap pada peranan UKM yang dianggap mampu dalam menangani masalah-masalah tersebut. UKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang dapat mengurangi pengangguran dan akan berkaitan dengan pengurangan jumlah kemiskinan serta pemerataan pendapatan.

Sektor usaha memang sangat menjanjikan bagi kabupaten Maros yang sangat dekat dengan kota Makassar sebagai pusat pemerintahan di provinsi Sulsel. Peluang usaha dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga pemerintah memandang dengan memberdayakan UMKM bisa mengatasi kemiskinan.

“Posisi kabupaten Maros sebagai jalur penghubung antar daerah tentu banyak dilalui oleh masyarakat sehingga peluang usaha memang sangat baik untuk dikembangkan, sehingga pemerintah kabupaten Maros harus senantiasa memberikan pelayanan dalam rangka memberdayakan UMKM di kabupaten Maros.” (Wawancara dengan FM 27/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan FM dapat dilihat posisi kabupaten Maros yang menjadi penghubung antar daerah memungkinkan kegiatan usaha menjadi peluang guna meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga langkah yang ditempuh pemerintah dalam memberdayakan para pelaku usaha sudah sangat tepat.

Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM menjadi langkah taktis yang ditempuh suatu daerah guna menjadi motor penggerak perekonomian nasional atau suatu daerah. Pemerintah

harus mampu memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada disuatu wilayah.

Sebagai daerah yang banyak bergerak pada sektor industry pemerintah kabupaten Maros memfokuskan kegiatan perekonomian melalui dunia usaha, karena selain meningkatkan perekonomian masyarakat juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

“Kalau saya melihat kegiatan perekonomian di kabupaten Maros ini lebih menekankan kepada masyarakat untuk membuka lapangan kerja sendiri. Sehingga pemerintah daerah melakukan kegiatan pemberdayaan untuk memastikan para pelaku usaha dapat meningkatkan usahanya. Dengan memberdayakan pelaku UMKM ini juga meningkatkan perekonomian daerah.” (Wawancara dengan HD 27/06/2019)

Hasil wawancara dengan informan HD dapat disimpulkan bahwasannya pembangunan sektor UMKM dikabupaten Maros guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pemasukan daerah.

Dari hasil observasi penulis dilapangan terkait pengaruh ekonomi, lingkungan sosial dan politik dalam pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Maros sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut. Sektor lingkungan sosial kegiatan usaha disuatu wilayah harus sejalan dengan adat istiadat masyarakat. Selanjutnya pada sektor ekonomi lebih kepada meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan bagi daerah dan dari segi politik menekankan pada produk sebuah kebijakan harus sejalan dengan upaya pemberdayaan bagi pelaku UMKM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar dan Ukuran Kebijakan adalah dengan membuat kebijakan agar masyarakat membuat perizinan dari berbagai jenis usaha, masyarakat pun mendapatkan bantuan modal dan timbal balik dari bantuan pemerintah tersebut membuat masyarakat rajin membayar pajak usaha.
2. Sumber Daya adalah ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan modal. Menanamkan pengetahuan kepada para pelaku usaha tentang bagaimana menjalankan usaha dengan baik membuat masyarakat lebih mudah mengembangkan usaha yang dimiliki. Selanjutnya ketersediaan modal merupakan penopang sehingga pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik..
3. Karakteristik Agen Pelaksana adalah disiplin dan tanggung jawab para agen pelaksana sehingga proses implementasi kebijakan terkait pemberdayaan UMKM terbilang berhasil. Struktur birokrasi yang

bekerja sesuai dengan standar operasional pelayanan menyempurnakan proses implementasi kebijakan.

4. Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana, Dinas Koperindag kabupaten Maros menjalankan beberapa strategi beberapa diantaranya dengan menyiapkan aparatur yang bertanggung jawab disetiap bidang yang ada serta dengan memberikan beberapa pelatihan kepada para pelaku UMKM. Selanjutnya pemerintah juga menjadi jembatan bagi para pelaku usaha dalam membangun komunikasi pada kegiatan usaha para pelaku UMKM.
5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah Sektor lingkungan sosial kegiatan usaha disuatu wilayah harus sejalan dengan adat istiadat masyarakat. Selanjutnya pada sektor ekonomi lebih kepada meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan bagi daerah dan dari segi politik menekankan pada produk sebuah kebijakan harus sejalan dengan upaya pemberdayaan bagi para pelaku UMKM.

B. Saran

1. Pemberdayaan UMKM seharusnya diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal.
2. Peran kelembagaan juga sebagai alat pembangunan yang ditujukan untuk memberi manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun manfaat tersebut bisa dirasakan optimal jika kelembagaan bekerja secara penuh membenahi UMKM dan membangun jangkauan yang baik bersama-sama dengan institusi informal, formal, dan kelembagaan yang ada di desa.

3. Saran yang dapat diberikan adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Maros sebaiknya melakukan pendataan terhadap semua jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Maros serta melakukan identifikasi berdaya tidaknya UMKM. Sehingga pemberdayaan dapat merata dan tepat sasaran.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan lebih rata dalam melakukan sosialisasi ke semua UMKM yang ada di Kabupaten Maros, mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan UMKM, dan mengadakan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan UMKM di Dinas Koperindag sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2011, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara: Jakarta
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malas Press : Malang
- Anggria Mardha Kashri dan Ahmad Zuber, “Upaya Pengentasan Kemiskinan Buruh Genteng Melalui Kegiatan Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus Kegiatan Pemberdayaan sosial Ekonomi pada Buruh Genteng di Sentral Industri Genteng Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagon, Kabupaten Kebumen”, *Jurnal Sosiologi DELIMA*, Vol. 31, No. 1, (Tahun 2016).
- Dunn N William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus, 1999, *Evaluasi Programdan Kebijaksanaan pemerintah, Pelatihan dan Teknik Manajemen Kebijakan Publik, Angkatan II*, UGM, Yogyakarta
- Edi, Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. cv alfabeta : Bandung
- Edi, Suharto. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. cv alfabeta : Bandung
- Fajry R, f. e. b. r. i. y. a. n. t. y. (2017). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros (Doctoral Dissertation).
- Gunawan, Sumodiningrat. 1989. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustakek Pelajar : Yogyakarta.
- Lihat Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta. Hal. 37
- Marcus Josep Pattinama, “Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal: Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat”, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, (Juli 2009).
- Marzuki, Ismail. 2015. *Skripsi “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kab Gresik”*. Ilmu Pemerintahan:UMM Hal.15

- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Media Komputindo : Jakarta
- Nur Atnan, “Efektivitas Strategi komunikasi Konsultan Dalam Program Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Raha Kabupaten Muna”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 14, No. 2, (Oktober 2015).
- Priyono Tjiptoherrijanto, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan Jaringan Pedesaan (sebagai Suatu Strategi)”, *Populasi*, Vol 2, No. 2, (Tahun 1997).
- Salusu J. 1998. *Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, PT. Grasindo : Jakarta
- Skripsi Muhammad Wahyudin, “implementasi program beras miskin di kec. Turikale Kab. Maros.” 2012
- Skripsi Pradytia Herlyansah, “Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di kota Tangerang”. 2016
- Soegijoko. 2001. *Kemiskinan dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Soegijoko : Bandung.
- Sri Rum Giyarsih, “Pengentasan Kemiskinan yang Komprehensif di Bagian Wilayah Terluar Indonesia: Kasus Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 21, No. 2, (Juli 2014).
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi berbasis kurikulum*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo : Yogyakarta
- Yanah, “Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia melalui Sinergi Antar Bank Syariah dan BAZNAS”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, No. 3, (Mei-Agustus 2014).



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221

Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588

Official Email : fisp@unismuh.ac.id

Official Web : <https://fisp.unismuh.ac.id>

Nomor : 0901/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Arniati AS

Stambuk : 105640216315

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros.

Judul Skripsi : *"Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 05 April 2019

Dekan,

Ub. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM: 1084 366



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 14004/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Maros

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1043/05/C.4-VIII/IV/1440/2019 tanggal 05 Maret 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ARNIATI AS**
Nomor Pokok : 105640216315
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 April s/d 06 Juni 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 08-04-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
 email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 151/IV/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 150/IV/REK-IP/DPMPTSP/2019

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : ARNIATI AS
 Nomor Pokok : 105640216315
 Tempat/Tgl.Lahir : MAKASSAR / 06 September 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Alamat : JL. BAHAGIA Lr.1 NO. 21 SUDIANG MAKASSAR
 Tempat Meneliti : 1. DINAS SOSIAL
 2. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 3. PELAKU UMKM DI KAB. MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MAROS”

Lamanya Penelitian : 08 April 2019 s/d 06 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



22 April 2019
KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. : 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMUH Makassar di Makassar
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAERAH**

*Jl. Jend. Sudirman Komp. Kantor Bupati Maros Lantai 2 telp. 0411371143 Kode Pos 90511
Email : diskoperindag@maroskab.go.id Website: www.maroskab.go.id*

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/urc-/Kop.Ukm.Dag/Set

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: NURJANNAH,S.Sos
NIP	: 19651103 198602 2 006
Jabatan	: Kasubag Umum,Asset dan Kepegawaian
Unit Kerja	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Maros

Dengan ini menyatakan bahwa saudara

N a m a	: ARNIATI AS
Tempat/tgl Lahir	: Makassar,06 September 1997
Alamat/HP	: Pattiro Deceng Kec.Camba Kabupaten Maros
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi (S1)
No.KTP/SIM	: -
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Nomor Pokok	: 105640216315

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan pengambilan Data/ izin Penelitian di Instansi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros pada tanggal, 08 April s/d 06 Juni 2019.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

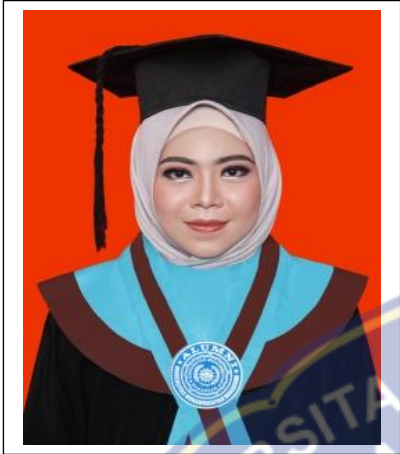
Maros, 06 Juni 2019

An. Kepala Dinas Koperasi,UKMdan Perdagangan
Kasubag Umum,Asset dan Kepegawaian



Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19651103 198602 2 006

RIWAYAT HIDUP



Arniati AS, Lahir pada tanggal 06 September 1997, di Kota Makassar. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan H. Ahmad Suardi dan Nurmi. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Negeri Mandai pada tahun 2003 sampai tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 9 Makassar dan tamat pada tahun 2012.

Setelah tamat di SLTP penulis melanjutkan ke jenjang SMA Negeri 7 Makassar dan tamat pada tahun 2015 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2019 penulis mendapatkan gelar S.IP dengan penelitian berjudul Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros. Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapatkan dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.